**STUDI TENTANG KINERJA PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA**

Hariatih¹

¹Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nobel Indonesia, Makassar

Email: ratihhariatih@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Keywords: Kinerja DPRD, Fungsi Pengawasan, Fungsi Penganggaran	Kinerja lembaga legislatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah capaian hasil aktivitas DPRD sesuai dengan fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja DPRD dalam bidang penggaran dan pengawasan APBD dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja lembaga DPRD tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Bima, Sekretaris DPRD, LSM dan Akademisi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hubungan tertentu untuk ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja DPRD Kabupaten Bima dalam Bidang Penganggaran belum mencapai tingkat yang diharapkan, sebagaimana terlihat dalam hal (a) Dalam melaksanakan fungsi anggaran anggota dewan tidak dapat mengoptimalkan proses penyampaian pembahasan dan pengesahan atas rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD menurut kerangka waktu, dan konsistensi dengan dokumen oleh perencanaan lainnya dan keberpihakkan pada kepentingan masyarakat; (b) Anggaran daerah sebagai hasil proses perencanaan, selalu terlambat dalam penetapanya; (c) Anggota dewan pada umumnya belum mengerti dan memahami muatan RPJMD. (2) Kinerja DPRD Kabupaten Bima dalam Bidang pengawasan belum mengerti prosedur tugas dan wewenang anggota DPRD, sebagaimana terlihat dalam hal (a) Anggota Dewan, belum fokus pada pengawasan kebijakan, karena rendahnya pengetahuan tentang anggaran pada umumnya; (b) Anggota dewan, belum berperan nyata sebagai wakil rakyat, dalam posisi jika terjadi penyimpangan dari kebijakan atau kesepakatan antara eksekutif. (c) Pengawasan anggota dewan lebih pada pengawasan politis dan kepentingan partainya.

PENDAHULUAN

Bergulirnya ketidakpuasan daerah terhadap pola pembangunan yang berlaku selama pemerintahan orde baru, direspon oleh pemerintah transisi dengan ditetapkannya Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perspektif undang-undang yang lama telah menguatkan dominasi pemerintah dibandingkan pemerintah daerah, sehingga pemberian otonomi kepada daerah tidak dirasakan secara nyata. Diskursus tentang otonomi daerah yang marak tentang pemberitaan di media massa, telah menjadi semacam tuntutan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) apakah

dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dalam peraturan pemerintahan atau peraturan pemerintahan daerah sebagai wakil rakyat atau yang berkonotasi negatif hanya sebagai simbol. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu: kompetisi; berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya. Produktivitas; kompetisi tersebut dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja atau *outcome* (Wibowo, 2007).

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2004). Peran dalam pengawasan di tingkat daerah adalah dilakukan oleh DPRD. Menurut UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 41, DPRD memiliki fungsi yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. Pada DPRD pengawasan yang dilakukan bersifat politik, dalam arti pengawasannya berbeda dengan pengawasan fungsional karena pengawasan politik lebih ditekankan pada laporan pertanggung jawaban keuangan oleh kepala daerah, sedangkan pengawasan fungsional lebih bersifat audit yang terperinci dan bersifat administratif. DPRD adalah lembaga perwakilan di daerah tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, lewat lembaga DPRD keluar kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.

DPRD yang salah satu fungsinya adalah pengawasan memiliki andil dalam mengawal dan mengawasi agar tujuan dari penyusunan APBD dapat terlaksana dengan baik, tetapi DPRD belum menunjukkan kinerja yang diharapkan, Anggaran untuk DPRD dalam jumlah besar tanpa perhitungan yang rasional dan proporsional. Di beberapa daerah ditemui anggaran DPRD yang berjumlah sekitar 60% ke atas dari Pendapatan Asli Daerah. Bahkan ada kabupaten yang anggaran untuk DPRD mencapai 100% sampai 135% dari PAD. Hal ini dinilai jelas tidak etis dan tidak rasional. Karena DPRD dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat, jika menggunakan 100% PAD untuk keperluan kegiatannya, berarti tidak menyisakan penggunaan anggaran untuk kepentingan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai tugas umum yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Fenomena gelombang tuntutan yang dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa dan aktivis pro demokrasi terhadap lembaga legislatif kita dari pusat hingga ke daerah paling tidak didasari atas beberapa alasan Pertama: Lembaga legislatif yang diharapkan sebagai "wasit" dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu malah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua: Lembaga legislatif di banyak daerah ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Ketiga: Para wakil rakyat itu ternyata tidak dapat menampung dan menyalurkan aspirasi konstituennya. Keempat:

Para wakil rakyat itu cenderung kepada kekuasaan (power oriented), dan kelima: Secara keseluruhan kinerja lembaga legislatif berada pada posisi yang mengecewakan.

Pencapaian dari suatu kinerja dinilai berdasarkan indikator tertentu yang menjadi pertimbangan utama, maka dari itu analisis standar belanja perlu dibuat dengan mengacu pada standar satuan harga untuk mencapai prestasi kerja berdasarkan standar pelayanan minimal. Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip alokasi dana. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya penguatan kapasitas aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengawasi penggunaannya.

Hasil penelitian yang dilakukan Sutriyanti (2004) untuk melihat atau menilai kinerja badan legislatif (DPR), harus berangkat dari fungsi-fungsi atau peran yang dilaksanakan oleh DPR artinya apakah kinerja DPR itu telah sesuai dengan fungsinya selaku badan legislatif, jika fungsi itu dilaksanakan dengan baik, maka dengan sendirinya, secara sederhana dapat dikatakan kinerja dengan baik. Menurut Mardiasmo (2004) Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan dengan secara efisien dan efektif yang pada dasarnya terdapat dua hal yang dijadikan sebagai indikator kinerja yaitu: (1) Kinerja Anggaran (Anggaran Policy) adalah alat atau instrument yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah. Alat tersebut berupa strategi makro dan policy yang tertuang dalam Perda dan Renstra. (2) Anggaran Kinerja adalah alat atau instrument yang dipakai oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada dibawah kendali kepala daerah selaku manajer eksekutif.

Untuk dapat mengukur kinerja organisasi, harus diketahui ukuran keberhasilan, sehingga indikator ukuran kinerja itu tentu dapat merefleksikan tujuan dan misi organisasi yang bersangkutan, karena itu berbeda yang satu dengan yang lain. Dwiyanto (1995) mengemukakan ada lima indikator untuk menilai kinerja organisasi publik yaitu: produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, sehingga mampu mewujudkan lembaga sebagaimana keinginan sehingga kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban diatur dalam Undang-undang. Hal mana perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan fungsi legislatif sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Menurut David Apter (1985) fungsi pertama badan legislatif adalah sistem demokrasi mewakili rakyat dan membuat undang-undang, dalam konteks Indonesia fungsi lembaga legislative di daerah (DPRD) secara eksplisit dituangkan dalam undang-undang Nomor 27 tahun 2009, yakni fungsi legislative, fungsi anggaran, dan fungsi kontrol, dua fungsi yang pertama legislasi dan anggaran, menempatkan hubungan kekuasaan horizontal antara DPRD dan kepala daerah, sedangkan fungsi kontrol menempatkan hubungan kekuasaan yang vertikal dimana DPRD diberi wewenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Pelaksanaan fungsi DPRD yakni: (1) Fungsi legislasi, merupakan kewenangan membentuk peraturan Daerah (PERDA), implementasi fungsi baik DPRD maupun kepala daerah diberi hak untuk mengajukan rancangan PERDA guna dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala Daerah, DPRD menggunakan hak inisiatif mengajukan usul Rancangan PERDA sebagai bentuk tanggung jawabnya mewakili rakyat untuk penyelenggaraan otonomi daerah. (2) Fungsi anggaran, merupakan kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD bersama kepala daerah. Fungsi ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang didesain dalam bentuk program-program pembangunan dengan pembiayaan APBD, dan (3) Fungsi kontrol, adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Pengawasan (kontrol) pihak DPRD terhadap kebijakan pemerintah hanya mencapai tingkat *output* suatu program.

Fokus penelitian ini adalah mempelajari Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam bidang penggarahan dan pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD). Dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja DPRD. Disamping itu, penelitian ini dapat memberi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga DPRD diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana dan tujuan serta rencana yang telah ditetapkan (Baswir, dalam Indriani & Baswir, 2003). Pengawasan juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana ditentukan (Sondang dalam Robinson, 2006). Sedangkan pengawasan keuangan daerah merupakan semua tindakan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya dilaksanakan pada tahap implementasi dan evaluasi tetap juga pada tahap perencanaan (Mardiasmo, 2001). Pengawasan keuangan daerah bukanlah tahap yang terpisah dari siklus anggaran tetapi merupakan bagian pelengkap pada tahap perencanaan hingga tahap pelaporan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap kinerja bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis kinerja Dewan Kabupaten Bima dalam pengawasan anggaran dalam Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini dimaksud untuk melihat pencapaian kinerja legislatif dalam fungsinya sebagai fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan dan melihat fenomenologis kinerja anggota DPRD di Kabupaten Bima.

Untuk melihat atau menilai kinerja, badan legislatif (DPRD), harus berangkat dari fungsi-fungsi atau peran yang dilakukan oleh DPRD, artinya apakah kinerja DPRD itu

telah sesuai dengan fungsinya selaku badan legislatif jika fungsi-fungsi itu dilakukan dengan baik maka dengan sendirinya, secara sederhana dapat dikatakan kinerja juga baik. Menurut Mardiasmo (2011) pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksud agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari prakti-praktik kolusi, korupsi dan nepoisme (KKN), baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggung jawabnya. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Sehingga pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Bima, yakni anggota DPRD yang terpilih kembali dan berpengalaman. Dari 45 orang jumlah anggota DPRD Kabupaten Bima, yang dijadikan sebagai informan penelitian dan telah diwawancarai berjumlah 10 orang, terdiri dari komisi anggota 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4, dan anggota badan anggaran dari. Selain infoman dari anggota DPRD, informan lain dari penelitian ini adalah Sekretaris DPRD, LSM dan Akademisi. Selain menggunakan wawancara, pengumpulan data juga munggunakan observasi/pengamatan dan studi kepustakaan. Sementara teknik pengumpulan data yang lain juga menggunakan teknik dokumentasi guna mendukung data primer. Teknik analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hubungan tertentu untuk ditarik suatu kesimpulan. Teknik analisis data secara kualitatif bertujuan untuk memberikan interpretasi/penafsiran atas fakta-fakta dalam suatu fenomena alamiah secara apa adanya (Moleong, 2004).

PEMBAHASAN

Kinerja DPRD dalam Fungsi Penganggaran

Salah satu peran DPRD menurut perundang-undangan nomor 32 tahun 2004 adalah fungsi pengaggaran, Dalam fungsi penganggaran DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif menjadi APBD, pengetahuan DPRD terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap pengetahuan DPRD sampai pada tahap pertanggung jawaban serta pengetahuan DPRD, tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengelola keuangan daerah APBD.

Proses penganggaran diawali APBD dari pembahasan kebijakan Umum, APBD (KUA), pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, sampai pelaksanaan dan pertanggung jawaban peraturan daerah tentang APBD seiring proses

pelaksanaan APBD, Anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah didalam pendayagunaan sumberdaya APBD dari perspektif politik, orientasi dasar dari peranan DPRD dalam penganggaran daerah saat ini berhadapan dengan isu-isu krusial pemerintahan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Dalam situasi demikian DPRD selalu dituntut untuk mencari upaya perbaikan pemerintah daerah dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Anggota DPRD, sebagai wakil rakyat diharapkan mampu merepresentasikan aspirasi dan kepentingan warga kedalam proses penganggaran daerah. Ethos dan hasil kerja anggota DPRD, yang demikian akan meningkatkan kepastian modal politik yang memang dibutuhkan anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. Sehubungan dengan fungsi penganggaran oleh DPRD, hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima yang menyatakan bahwa:

“Fokus sorotan DPRD dalam ketidaktepatan waktu menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) oleh eksekutif terhadap DPRD, dan keterlambatan penyampaian SKPD yang dimana tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang terakhir dari 2011-2015 dikabupaten Bima. Itu berarti untuk mewujudkan semua agenda pembangunan, diharapkan kinerja dari pihak eksekutif dan legislatif, ketepatan waktu yang harus disesuaikan jadwal penyampainnya”.

Hal senadapun disampaikan oleh anggota dewan Edi Muhlis, S.sos. pada rapat penetapan APBD tahun 2015, yang menyatakan:

“rapat paripurna beberapa kali ditunda, lantaran ada beberapa fraksi yang tidak mampu menyelesaikan tugas masing-masing fraksi, alasannya, karena banyak anggota fraksi yang tidak masuk kerja, sehingga waktu pembahasan tidak cukup ditingkat fraksi maupun komisi”.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, Program Prioritas Bupati dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi landasan dan Pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lembaga-lembaga vertikal di daerah, dunia usaha, dan lembaga non pemerintah, serta seluruh masyarakat luas Kabupaten Bima, maka dalam proses penyusunannya juga telah mencerminkan keterlibatan pihak- pihak terkait. Perumusan Rancangan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2011-2015, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta amanat peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan memberikan masukan kepada Kepala Daerah terpilih serta

mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD.

Pembahasan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA), merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun, sebagai perincian lebih teknis dari dokumen, Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam kebijakan umum APBD (KUA), yang merupakan implementasi dari Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan sumber penganggaran dari dana APBD sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Kebijakan Umum APBD (KUA), termasuk formulasi kebijakan anggaran (*Budget policy formulation*), yang dimaksud sebagai acuan dalam perencanaan operasional anggaran serta pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, adalah: (1) Memperjelas capaian kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran; (2) Memperbesar penyusunan perencanaan operasional anggaran (*Budget operation planning*); (3) Memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya; dan (4) Menjadi petunjuk dan pedoman dalam penyusunan APBD serta menjadi dasar penyusunan program / kegiatan untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Pengetahuan tentang anggaran sebagai proses untuk menyusun rencana pendapatan dan belanja dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan bagian dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan kebijakan di Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir.Suryadin anggota DPRD kabupaten Bima komisi III (Tiga), menyatakan:

“Dokumen perencanaan pembangunan mempunyai fungsi strategis karena menyangkut pilihan terhadap program kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu setiap anggota DPRD seharusnya lebih memahami dan mengerti tentang penganggaran, yang seharusnya dibekali oleh SDM dan berbagai pengalaman yang berkaitan dalam penganggaran yang mesti dimiliki oleh setiap anggota DPRD”.

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan dewan tentang anggaran erat kaitannya dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan

DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca "anggaran" serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Hal senadapun dilontarkan oleh dosen STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Politik) Bima Syarif Ahmad, M.Si menyatakan:

"Bahwa buruknya kinerja DPRD dalam pemahaman tentang anggaran, merupakan kendala dalam menyusun dan menyepakati APBD, yang seharusnya tingkat pendidikan dan pengalaman politik lebih diprioritaskan dalam merekrut setiap calon anggota legislatif yang akan diusung oleh partai politik. Karena kemajuan pembangunan didasari pada tingkat sumber daya manusia, bagaimana anggota dewan melaksanakan tuntutan rakyat jika visi, misi dan sasaran pembangunan daerah tidak diketahui oleh anggota dewan Kabupaten Bima yang pada umumnya".

Proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik. Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses KUA dan PPAS. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan.

Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggung jawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan publik. Pengawasan anggaran secara yuridis telah diatur baik ditingkat undang-undang, peraturan pemerintah maupun dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Fungsi pengawasan terhadap APBD harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dan telah tepat sasaran sehubungan dengan hal tersebut salah satu anggota komisi III, Drs. Mustahid menyatakan bahwa:

"Pengawasan terhadap APBD lebih bersifat normatif, sepanjang tidak ada permasalahan atau pelaporan tentang anggaran APBD, pengawasan APBD harus transparansi karena ini merupakan ketentuan publik sehingga masyarakat juga berhak mengawasi APBD, karena tugas DPRD yang melekat pada kerja dan kinerja pemerintah".

Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses pengawasan dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman dewan tentang anggaran sangatlah penting, sehingga proses pengawasan

APBD lebih transparansi, dan akuntabel karena selama ini masih ada ketertutupan dalam pelaksanaan program atau proyek, dengan contoh kasus yang kita lihat dalam ketentuan panpres Nomor 54 tahun 2009 yang mengharuskan ada papan nama proyek, kenyataan tidak selalu ada

"Jangankan masyarakat anggota dewanpun kadang tidak mengetahui ada proyek dilokasi itu".

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok, masyarakat saja secara tidak proporsional. Berkenaan pada tingkat kepuasan, dalam kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, informan dari akademisi, mengatakan belum puas, dikarenakan pada umumnya anggota legislatif sekarang ini belum memahami fungsinya sebagai wakil rakyat. Menurut Mardiasmo (2004), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun 2015 tersebut, mengacu Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 yang merupakan dokumen tahunan daerah digunakan sebagai pedoman dan arahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen tersebut juga sebagai pedoman yang dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD agar APBD untuk dijalankan berdasarkan fungsinya sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan dasar otorisasi anggaran dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima Tahun 2012 tercatat sebesar 5,90% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 5,63%. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6,19% dan pada tahun 2014 diatas 6,21%, sehingga pada tahun pada tahun 2015 diperidiksikan mencapai diatas 6,21%. Dengan kenaikan ini seharusnya masyarakat pada tingkat pendidikan dan kesehatan sudah mengalami kemajuan, yang dilihat dari kesehatan tidak adanya lagi anak-anak yang menderita gizi buruk, kematian ibu melahirkan dikarenakan lambat penanganannya, dan dilihat dari pendidikan masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah, hal ini menjadi keperihatinan, maka seharusnya pemerintah perlu melakukan langkah-langkah untuk menagani masalah ini, dalam laporan LKPJ Bupati, harusnya menjelaskan sekurang-kurang pencapain target dan sasaran program sehingga dapat terukur secara kualitatif dan kuantitatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Kinerja DPRD Kabupaten Bima, dalam Bidang Penganggaran belum mencapai tingkat yang diharapkan, sebagaimana terlihat dalam hal (a) Dalam

melaksanakan fungsi anggaran anggota dewan tidak dapat mengoptimalkan proses penyampaian pembahasan dan pengesahan atas rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD menurut kerangka waktu, dan konsistensi dengan dokumen oleh perencanaan lainnya dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat; (b) Anggaran daerah sebagai hasil proses perencanaan, selalu terlambat dalam penetapannya; (c) Anggota dewan pada umumnya belum mengerti dan memahami muatan RPJMD. (2) Kinerja DPRD Kabupaten Bima dalam Bidang pengawasan belum mengerti prosedur tugas dan wewenang anggota DPRD, sebagaimana terlihat dalam hal (a) Anggota Dewan, belum fokus pada pengawasan kebijakan, karena rendahnya pengetahuan tentang anggaran pada umumnya; (b) Anggota dewan, belum berperan nyata sebagai wakil rakyat, dalam posisi jika terjadi penyimpangan dari kebijakan atau kesepakatan antara eksekutif. (c) Pengawasan anggota dewan lebih pada pengawasan politis dan kepentingan partainya.

DAFTAR PUSTAKA

- After David E. 1985. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: LP3ES
- Swasta, Basu. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Lyberti.
- Deddi Noordiwan. 2006. *Akunatnsi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwiyanto Agus, 1995. Reformasi Birokrasi Public Indonesia. Yogyakarta: Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gajah Mada.
- Ferdinant Nuru dan Lydia Mawikere 2013, Pengaruh Latar Belakang dan Pengalaman Politik Terhadap Kinerja Dewan Dalam Pengawasan APBD, Jurnal Accountanbility Vol 2 no 1, Juni 2003.
- Ghozali Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivaret, Semarang : BP Universitas Dipenegoro.
- Halim Abdul.2012, Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi keuangan Daerah, Jakarta Selatan, Salemba Empat.
- Haryadi Agus et,al 2003, Bilameral Bukan Federal kelompok DPD di MPR
- Jaka Winarna Dan Sri Murni 2006, Pengaruh Personal Background Dan Pengetahuan Tentang Anggaran terhadap Peran DPRD Dalam pengawasan Keuangan Daerah.Jurnal Symposium Akunatnsi X 2007 di Unhas.
- Josep RawoKaho, 1991, Perspektif Otonomi Daerah NKRI (Identitas yang mempengaruhi penyelenggara), Rajawali Jakarta.
- Jufri Darma Dan Ali Fikri 2012, pengaruh Pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap, pengawasan Keuangan daerah partisipasi Nomor 1 Juni 2012.
- Kartiwa H.A,2009. Implementasi peran dan fungsi DPRD Dalam mewujudkan GoodGovernance, Pascasarjan Universitas Padjajaran Bandung.
- Krina, 2003, Indikator dan alat ukur prinsip Transparansi partisipasi dan akuntabilitas,(Web <http://www.goodgoverance.com>).
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- La Palambora, J.1974, Politcs With In National. Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc.
- Laksono Agung,2009, Fungsi DPR-RI Pasca perubahan UUD 1945, Dalam Jurnal majelis

- Mardiasmo, 2001, Pengawasan, pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, Andi Jokjakarta
- _____, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Layanan Publik, Majalah Swara MEP, Jokjakarta.
- Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT Remaja Rosta Karya.
- Mudyahardjo Redja, 2009, Pengantar Pendidikan Jakarta Rajawali Press Jakarta,
- Sastroadmodjo, Sujiono, 1995, Perilaku politik, Semarang, IKIP Semarang Press.
- Sanit Arbi, 1995, Sistem Politik Indonesia, Rajawali press Jakarta.
- Sopana Dan Mardiasmo 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah symposium nasional akuntansi VI 16-17 oktober Surabaya.
- _____ dan Isa Wahyudi 2005, Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, Malang Corruption Watch, (MCM).
- _____, 2004 Menyoal Anggaran Publik, dalam pesangon Gate, bulletin suara korban, Malang Cooperation Watch, edisi 1 Maret 2004.
- Silver D, 2005, Creating Transparency for public Companies, Market place Publik relation strategis, Rajawali Jakarta.
- Subakti Ramlan A, dkk, 2002 Peran DPRD Untuk mencapai Tujuan dan Perspektif daerah Tentang pelaksanaan Desentralisasi, Universitas Andalas, Regional University Research, on Decentralization in Indonesia.
- Tonobessy Rudi, 2011, Memotret Kinerja DPRD, Blok Spoot diunduh Januari 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yudoyono, Bambang, 2002. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm.